

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori menjelaskan keterkaitan antara rumusan masalah penelitian pengembangan sentra produksi jagung Kecamatan Limboto dan teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

Teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pertama adalah Azas Pengembangan Sentra Produksi (Soemarno, 1996) mengenai karakteristik biofisik, karakteristik ekonomi, dan karakteristik sosial kependudukan Kecamatan Limboto serta karakteristik budidaya jagung Kecamatan Limboto.

Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah kedua adalah dengan menguji kesesuaian kondisi sentra produksi Kecamatan Limboto terhadap Azas Kesesuaian Kawasan Sentra Produksi (Soemarno, 1996) yang terdiri atas aktivitas biofisik, aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial; serta identifikasi faktor-faktor/kegiatan penunjang. Kajian aktivitas biofisik menggunakan Analisis Kemampuan Lahan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2009 dan Analisis Kesesuaian Lahan (Sadyohutomo, 2006); kajian ekonomi menggunakan Analisis Biaya Sumberdaya Domestik (Soekartawi, 1996) dan Analisis Kuosien Lokasi/LQ (Adisasmita, 2008); kajian aktivitas sosial menggunakan metode analisis deskriptif mengenai asal dan lama usaha pertanian jagung dan kesesuaian sosio-teknologis serta analisis kebijakan daerah dengan menggunakan Metode *Content Analysis* (Ekomadyo, 2006).

Pembahasan lainnya dalam menguji kesesuaian aktivitas sentra produksi Kecamatan Limboto dengan Konsep Pengembangan Kawasan Sentra Produksi adalah kajian mengenai faktor/kegiatan penunjang sentra produksi. Kajian faktor/kegiatan penunjang sentra produksi membahas mengenai struktur tata ruang Kecamatan Limboto terkait dengan infrastruktur yang disesuaikan dengan standar infrastruktur dimaksud menurut Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah Kementerian Pekerjaan Umum; Kajian *Linkage System*/Sistem Keterkaitan (Kuncoro, 1992); kajian aksesibilitas menggunakan Teori Aksesibilitas Black (1991) dalam Tamin (2000); kajian kelembagaan (Edilius dan Sudarsono, 1993); serta kajian sumberdaya manusia Kecamatan Limboto menggunakan Analisis Sosial yang ditinjau dari ketenagakerjaan dan pendidikan berdasarkan Modul Pedoman Perencanaan Tata

Ruang tentang Teknik Analisis Aspek Fisik, Ekonomi, dan Sosial menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007.

Pembahasan untuk menjawab rumusan masalah ketiga menggunakan Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi/MAAMS (Harsono, 2008) sebagai kajian pengembangan sentra produksi jagung Kecamatan Limboto berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua serta hasil dari *Content Analysis* kebijakan daerah terkait sentra produksi jagung Kecamatan Limboto. Pembahasan terakhir untuk menjawab rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini adalah mengenai Metodologi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi serta Peta Pengembangan Sentra Produksi dan Program Peta Pengembangan Sentra Produksi (Soemarno, 1996) yang diawali dengan delineasi sistem kawasan sentra produksi jagung Kecamatan Limboto dengan menggunakan Teori Lokasi Aksial-Radikal (Rustiadi, dkk., 2011) dan Teori Lokasi Weber (Adisasmita, 2011) untuk mengetahui lokasi industri potensial yang memungkinkan pada sistem kawasan sentra produksi jagung Kecamatan Limboto.

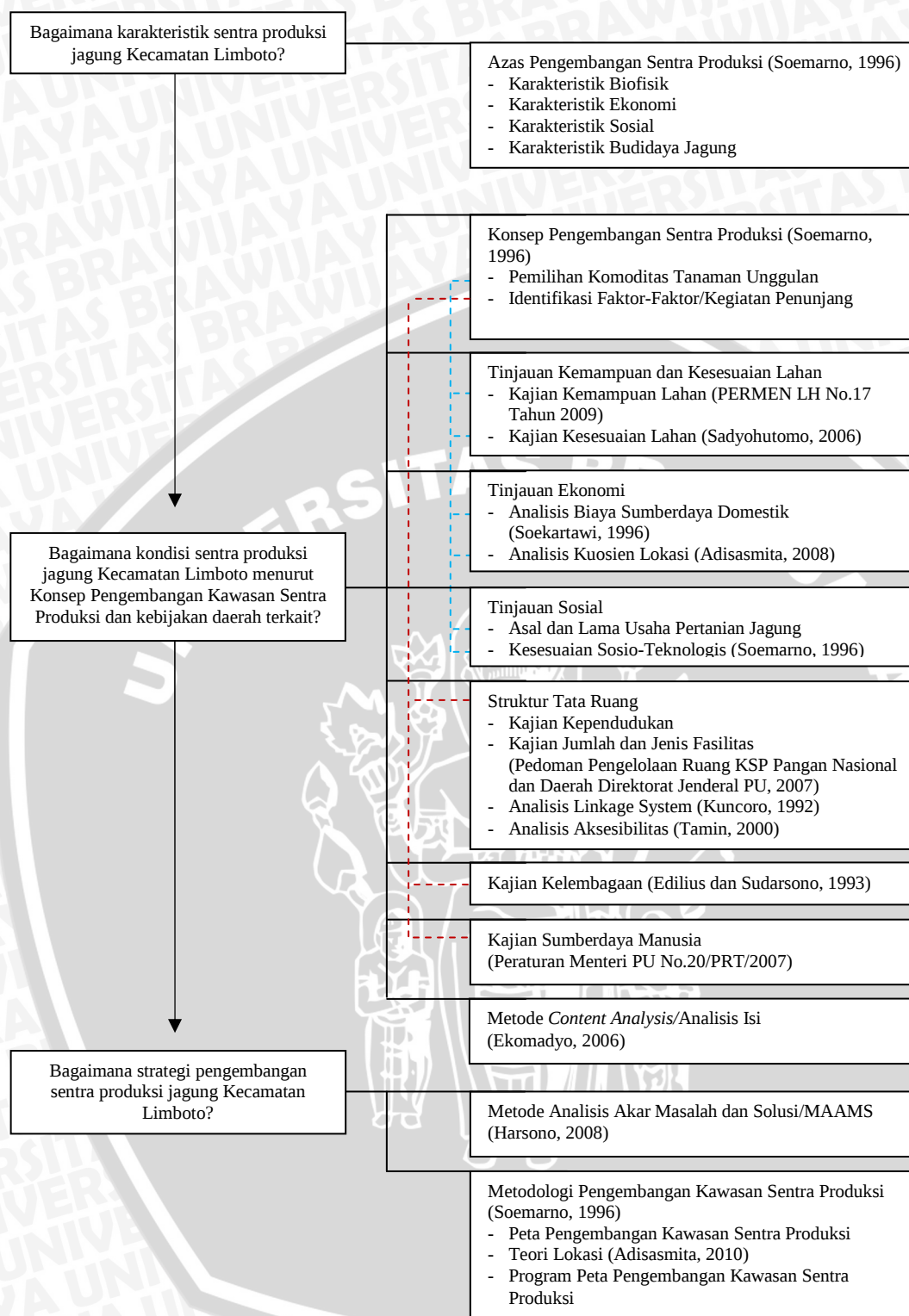
2.2 Tinjauan Kawasan Sentra Produksi

2.2.1 Pengertian Kawasan Sentra Produksi

Kawasan Sentra Produksi merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya yang terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memerhatikan skala ekonomi kawasan yang ada (Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum, 2007).

Kawasan Sentra Produksi pada dasarnya adalah kawasan dengan kegiatan utama yang berkaitan dengan komoditas unggulan dari suatu daerah, penentuan lokasi Kawasan Sentra Produksi dipilih dengan mempertimbangkan aksesibilitas kawasan yang baik dan lancar (Sjafrizal, 2008:147).

Menurut Soemarno (1996:2), KSP pada dasarnya secara teknis mengaitkan kegiatan produksi dan pemasaran melalui pengembangan kelembagaan bisnis yang meliputi seluruh proses kegiatan agrobisnis sub sistem produksi dan pendukungnya, sub sistem pengolahan, dan sub sistem pemasaran.



Gambar 2.1
Kerangka Teori Pengembangan Sentra Produksi Jagung
Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

2.2.2 Azas Pengembangan Sentra Produksi

Beberapa pendekatan dasar (azas) yang diperlukan dalam model implementasi Strategi Pengembangan Sentra Produksi adalah sebagai berikut:

1. Azas kesesuaian

Pemilihan komoditas tanaman yang akan dikembangkan pada suatu daerah seyogyanya memerhatikan kesesuaian (suitabilitas) komoditas tersebut terhadap aspek biofisik, sosial dan ekonomi.

a. Kesesuaian biofisik

Kesesuaian biofisik meliputi kesesuaian terhadap kondisi iklim dan lahan dengan kebutuhan khas dari komoditas tanaman yang akan dikembangkan.

b. Kesesuaian ekonomi

Pengembangan komoditas tanaman seyogyanya memerhatikan aspek ekonomi. Kesesuaian ekonomi mencakup kajian apakah hasil produksi komoditas tanaman pada suatu kawasan pengembangan mampu bersaing di pasar lokal, regional bahkan internasional.

c. Kelayakan sosial

Kelayakan sosial yang dimaksudkan adalah kesesuaian keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan suatu komoditas dengan kemampuan atau keterampilan rata-rata yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

2. Azas kelestarian

Pendekatan ini dikembangkan dari aspek fisik/lingkungan dari konsep pembangunan yang berlanjut. Pemilihan lokasi pengembangan sentra produksi diharapkan memerhatikan aspek kelestarian sumberdaya lahan dan lingkungan kawasan pengembangan (Soemarno, 1996:375).

2.2.3 Kajian Pengembangan Sentra Produksi

Menurut Soemarno (1996:374-380), untuk melakukan alokasi pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian yang diwujudkan ke dalam Peta Pengembangan Sentra Produksi, diperlukan beberapa kajian, antara lain berupa: (i) pemilihan komoditas tanaman unggulan, (ii) pemilihan lokasi pengembangan, (iii) identifikasi faktor-faktor/kegiatan penunjang.

1. Pemilihan Komoditas Tanaman Unggulan

Komoditas yang akan diprioritaskan pengembangannya dikaji berdasarkan beberapa azas/pendekatan, yaitu:

a. Kesesuaian Biofisik

Komoditas yang dikembangkan hanyalah komoditi yang sesuai dengan kondisi kawasan pengembangan. Komoditas dimaksud dapat ditemukan dengan menggunakan analisis kesesuaian lahan dan beberapa parameternya.

b. Kesesuaian Ekonomi

Komoditas yang akan dikembangkan dikaji apakah memiliki prospek pemasaran yang cukup baik ditingkat lokal, regional, atau internasional. Serta apakah komoditas tanaman tersebut dapat berfungsi sebagai penggerak/pemacu pengembangan ekonomi wilayah. Metode yang dapat digunakan untuk maksud tersebut antara lain Biaya Sumber Daya Domestik; Analisis Input-Output; *Location Quotient*; dan sebagainya.

c. Kesesuaian Sosial

Pemilihan komoditas tanaman diprioritaskan pada komoditas yang telah dikenal oleh masyarakat atau komoditas tanaman baru yang diyakini dapat dikembangkan di wilayah atau ditengah masyarakat tersebut. Analisis kesesuaian ini dapat dilakukan secara deskriptif atau menggunakan analisis kesesuaian sosio-teknologis.

2. Pemilihan Lokasi Pengembangan

Pemilihan lokasi/sentra pengembangan komoditas tanaman unggulan dilakukan dengan beberapa pertimbangan, antara lain:

a. Kesesuaian Fisik

Pengembangan komoditas tanaman hanyalah dilakukan pada lokasi yang sesuai menurut hasil kesesuaian lahan berdasarkan sifat iklim dan sifat lahannya.

b. Kesesuaian Ekonomi

Lokasi pengembangan dipilih berdasarkan keunggulan lokasi yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan komoditas tanaman yang berdaya saing tinggi di berbagai tingkat pasar.

c. Kesesuaian Sosial

Komoditas dikembangkan pada lokasi dimana masyarakatnya dapat memberikan partisipasi aktif terkait kemampuan atau keterampilan rata-rata yang dimiliki oleh masyarakat.

3. Identifikasi Faktor-Faktor Penunjang

Faktor-faktor penunjang yang dimaksud antara lain:

a. Struktur Tata Ruang

Pengembangan kawasan budidaya pertanian diarahkan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin kesempatan ekonomi (*economy opportunities*) yang dimiliki lahan. Metode analisis yang dapat dipakai untuk maksud penataan tersebut antara lain:

- 1) Kajian untuk memperkirakan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan untuk melayani kegiatan-kegiatan budidaya pertanian yang ada. Jumlah dan jenis fasilitas pelayanan dimaksud dapat diketahui dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh instansi/departemen teknis yang terkait.
- 2) Analisis sistem hubungan, yang dilakukan untuk mengetahui kawasan yang memiliki lokasi strategis yang dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan lokal maupun regional.
- 3) Analisis aksesibilitas, untuk mengetahui tingkat aksesibilitas lokasi untuk menikmati fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang terletak pada pusat-pusat pelayanan. Peningkatan atau pembuatan jalan baru akan memengaruhi jangkauan fungsi pelayanan dari satuan pemukiman yang ada.

b. Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan baik formal yang dibentuk oleh pemerintah maupun kelembagaan non-formal yang dibentuk berdasarkan swadaya masyarakat setempat. Kelembagaan ini dibutuhkan untuk menunjang program sentra produksi, antara lain kelembagaan yang berkaitan dengan proses produksi, pemasaran, dan keuangan.

Menurut Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum Tahun 2007 sistem kawasan pada kawasan sentra produksi terdiri atas:

1. Kawasan lahan pertanian (*hinterland*)

Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian.

2. Kawasan permukiman

Merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra produksi.

3. Kawasan pengolahan dan industri

Merupakan kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan. Di kawasan ini bisa berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.

4. Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum

Terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.

Adapun infrastruktur penunjang yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan sentra produksi meliputi:

1. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis

hulu (*upstream agribusiness*) dapat berupa:

- a. Jalan penghubung antar desa-kota
- b. Gudang penyimpanan Saprotan (sarana produksi pertanian)
- c. Tempat bongkar muat Saprotan

2. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha

tani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) untuk peningkatan produksi usaha dapat berupa:

- a. Jalan usaha tani (*farm road*) dari desa pusat ke desa *hinterland* maupun antar desa *hinterland* yang menjadi pemasok hasil pertanian.
- b. Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan sarana irigasi untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian.
- c. Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, dan tambatan perahu pada kawasan budidaya perikanan tangkapan, baik di danau ataupun di laut.
- d. Sub terminal pengumpul pada desa-desa yang menjadi *hinterland*.

3. Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis

hilir (*downstream agribusiness*) dapat berupa:

- a. Sarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan.

- b. Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*).
- c. Sarana pengolahan hasil pertanian seperti: tempat penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana industri-industri rumah tangga.
- d. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti: pasar tradisional, kios cendramata, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, dan terminal agribisnis.
- e. Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat barang, termasuk sub terminal agribisnis (STA).
- f. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis.
- g. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi usaha bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis.
- h. Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa, dan jalan lingkaran desa yang menghubungkan beberapa desa *hinterland*.
- i. Sarana penunjang seperti: pembangkit listrik, telepon, sarana air bersih untuk pembersihan dan pengolahan hasil pertanian, sarana pembuangan limbah industri dan sampah hasil olahan.

2.3 Kemampuan Lahan

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub-kelas, dan unit pengelolaan.

Dalam menganalisis kemampuan suatu lahan, dapat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah yang berisi metode penentuan kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.

A. Klasifikasi Kemampuan Lahan Dalam Tingkat Kelas

Lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas, yang ditandai dengan huruf romawi I sampai dengan VIII. Dua kelas pertama (kelas I dan kelas II) merupakan lahan yang cocok untuk penggunaan pertanian dan 2 (dua) kelas terakhir (kelas VII dan VIII)

merupakan lahan yang harus dilindungi atau untuk fungsi konservasi. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk berbagai pemanfaatan lainnya. Meskipun demikian, lahan kelas II dan kelas IV masih dapat digunakan untuk pertanian. Keterangan lebih rinci mengenai klasifikasi kelas lahan dan penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Klasifikasi Lahan dalam Tingkat Kelas

Kelas	Kriteria	Penggunaan
I	1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya 2. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian. 3. Karakteristik lahannya antara lain: Topografi hampir datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air, subur, tidak terancam banjir.	Pertanian: a. Tanaman pertanian semusim b. Tanaman rumput c. Hutan dan cagar alam
II	1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi sedang. 2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan.	Pertanian: a. Tanaman semusim b. Tanaman rumput c. Padang Penggembalaan d. Hutan Produksi e. Hutan Lindung f. Cagar alam
III	1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus. 2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. 3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut.	1. Pertanian: a. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya b. Tanaman rumput c. Hutan produksi d. Padang penggembalaan e. Hutan lindung dan suaka alam 2. Non-pertanian
IV	1. Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. 2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan.	1. Pertanian: a. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya b. Tanaman rumput c. Hutan produksi d. Padang penggembalaan e. Hutan lindung dan suaka alam 2. Non-pertanian
V	1. Tidak terancam erosi tetapi mempunyai hambatan yang tidak mudah untuk dihilangkan, sehingga membatasi pilihan penggunaannya. 2. Mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman. 3. Terletak pada topografi datar-hampir datar tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau iklim yang kurang sesuai.	1. Pertanian: a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non-pertanian
VI	1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk	1. Pertanian: a. Tanaman rumput b. Padang penggembalaan c. Hutan produksi d. Hutan lindung dan cagar alam 2. Non-pertanian

Kelas	Kriteria	Penggunaan
	menghindari erosi.	
VII	1. Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, karena itu pemanfaatannya harus bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.	a. Padang rumput b. Hutan produksi
VIII	1. Sebaiknya dibiarkan secara alami 2. Pembatas dan ancaman sangat berat dan tidak mungkin dilakukan tindakan konservasi, sehingga perlu dilindungi.	a. Hutan lindung b. Rekreasi alam c. Cagar alam

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009

B. Kemampuan Lahan dalam Tingkat Sub-kelas

Kemampuan lahan kategori kelas dapat dibagi ke dalam kategori sub-kelas yang didasarkan pada jenis faktor penghambat atau ancaman dalam penggunaannya. Kategori subkelas hanya berlaku untuk kelas II sampai dengan kelas VIII karena lahan kelas I tidak mempunyai faktor penghambat.

Kelas kemampuan lahan seperti tersebut di atas (kelas II sampai dengan kelas VIII) dapat dirinci ke dalam sub-kelas berdasarkan empat faktor penghambat, yaitu:

1. Kemiringan lereng (t)
2. Penghambat terhadap perakaran tanaman (s)
3. Tingkat erosi/bahaya erosi (e)
4. Genangan air (w)

Cara penamaan kelas dan sub-kelas dilakukan dengan menuliskan faktor penghambat di belakang angka kelas, contoh: lahan kelas III dengan faktor penghambat kelerengan (t) ditulis III_t, lahan kelas II dengan faktor penghambat erosi (e) ditulis II_e, lahan kelas II dengan faktor penghambat drainase (w) ditulis II_w; dan lahan kelas IV dengan faktor penghambat perakaran tanaman karena kedalaman tanah (s) ditulis IV_s.

C. Kemampuan Lahan Pada Tingkat Unit Pengelolaan

Kemampuan lahan pada tingkat unit pengelolaan memberikan keterangan yang lebih spesifik dan detail dari sub-kelas. Tingkat unit pengelolaan diberi simbol dengan menambahkan angka dibelakang simbol sub-kelas. Angka ini menunjukkan besarnya tingkat faktor penghambat yang ditunjukkan dalam sub-kelas, misalnya II_w₁, IV_s₃, dan sebagainya.

Klasifikasi pada kategori unit pengelolaan memperhitungkan faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen atau sulit diubah seperti tekstur tanah, lereng permukaan, kedalaman efektif tanah, dan tingkat kepekaan terhadap erosi. Faktor-faktor

tersebut digolongkan berdasarkan intensitas faktor penghambat atau ancaman, sebagai berikut:

1. Tekstur Tanah

Tekstur tanah dikelompokkan ke dalam lima kelompok sebagai berikut:

- t_1 = halus: liat, liat berdebu
- t_2 = agak halus: liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir
- t_3 = sedang: debu, lempung berdebu, lempung
- t_4 = agak kasar: lempung berpasir
- t_5 = kasar: pasir berlempung, pasir

2. Kedalaman Efektif Tanah

Kedalaman sampai kerikil, padas, plinthite (k) dikelompokkan sebagai berikut:

- k_0 = dalam: >90 cm
- k_1 = sedang: 90-50 cm
- k_2 = dangkal: 50-25 cm
- k_3 = sangat dangkal: <25 cm

3. Kelerengan

Lereng permukaan dikelompokkan sebagai berikut:

- l_0 = (A) = 0-3% : datar
- l_1 = (B) = 3-8% : landai/berombak
- l_2 = (C) = 8-15% : agak miring/bergelombang
- l_3 = (D) = 15-30% : miring berbukit
- l_4 = (E) = 30-45% : agak curam
- l_5 = (F) = 45-65% : curam
- l_6 = (G) = >65% : sangat curam

4. Erosi

Tingkat erosi dikelompokkan sebagai berikut:

- e_0 = tidak ada erosi
- e_1 = ringan: 25% lapisan atas hilang
- e_2 = sedang: 25-75% lapisan atas hilang, <25% lapisan bawah hilang
- e_3 = berat: >75% lapisan atas hilang, <25% lapisan bawah hilang
- e_4 = sangat berat: sampai lebih dari lapisan bawah hilang

Kriteria klasifikasi untuk masing-masing kelas tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Klasifikasi Kemampuan Lahan pada Tingkat Unit Pengelolaan

Faktor Penghambat /Pembatas	Kelas Kemampuan Lahan							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Tekstur Tanah	t_2/t_3	t_1/t_4	t_1/t_4	(*)	(*)	(*)	(*)	t_5
Lereng Permukaan	l_0	l_1	l_2	l_3	(*)	l_4	l_5	l_6
Kedalaman Efektif	k_0	k_0	k_1	k_2	(*)	k_3	(*)	(*)
Erosi	e_0	e_1	e_1	e_2	(*)	e_3	e_4	(*)

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009

Keterangan : (*) dapat mempunyai sebaran sifat faktor penghambat dari kelas yang lebih rendah

(**) permukaan tanah selalu tergenang air

2.4 Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah penilaian mengenai kesesuaian suatu bentang lahan terhadap penggunaan tertentu pada tingkat pengelolaan dan hasil yang wajar, dengan tetap memerhatikan kelestarian produktifitas dan lingkungannya. Penilaian kesesuaian tanah bertujuan menetapkan pilihan penggunaan lahan tertentu yang secara ekonomis menguntungkan dan berwawasan lingkungan (Sadyohutomo, 2006:33).

Langkah-langkah untuk menyusun kelas kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Pelajari sifat-sifat lahan yang bagaimana yang dibutuhkan oleh bangunan yang akan dibangun.
2. Pilih beberapa sifat-sifat lahan yang erat kaitannya dengan kebutuhan bangunan tersebut untuk digunakan sebagai parameter kelas kesesuaian lahan. Setiap jenis penggunaan mungkin mempergunakan parameter yang berbeda-beda sesuai kebutuhan seperti yang ditentukan pada langkah 1.
3. Buat klasifikasi untuk setiap parameter secara berjenjang sesuai dengan ketelitian yang dikehendaki.
4. Buat kombinasi antar kelas parameter-parameter untuk membuat tingkat kesesuaian lahan, mulai dari yang paling sesuai sampai yang tidak sesuai.

Tabel 2.3 Kelas Kesesuaian Lahan

No.	Kelas	Tingkatan	Ketentuan
1.	S1	Sesuai	Lahan tidak mempunyai pembatas yang berarti untuk jenis penggunaan tertentu secara berkelanjutan, atau hanya mempunyai pembatas sangat kecil yang tidak berarti dalam pengurangan produktifitas atau manfaat dan tidak akan mempertinggi investasi (masukan teknologi dalam penggunaan lahan) di atas tingkat yang wajar.
2.	S2	Kesesuaian sedang	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang dalam keseluruhannya merupakan pembatas tingkat sedang untuk jenis penggunaan tertentu secara berkelanjutan, pembatas-pembatas tersebut akan mengurangi produktifitas atau manfaat dan menambah masukan teknologi dalam penggunaan lahan sampai suatu tingkat dimana keuntungan keseluruhan yang diperoleh dari

No.	Kelas	Tingkatan	Ketentuan
			penggunaan tersebut, meskipun masih menarik, tetapi mutunya agak lebih rendah daripada kelas S1.
3.	S3	Kesesuaian kecil	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang dalam keseluruhannya merupakan pembatas tingkat berat untuk penggunaan tertentu secara berkelanjutan, dan akan lebih besar mengurangi produktifitas atau manfaat, atau meningkatkan masukan teknologi dalam penggunaan lahan dengan biaya agak berat.
4.	S4	Sesuai bersyarat	Lahan yang memerlukan perlakuan khusus atau lahan dimana memerlukan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi untuk berhasilnya suatu penggunaan lahan.
5.	T	Tidak sesuai	Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang kritis sehingga dianggap tidak sesuai bagi penggunaan lahan tertentu menurut kriteria yang digunakan.

Sumber : Sadyohutomo, 2006:34

2.5 Biaya Sumberdaya Domestik (BSD)

Biaya Sumberdaya Domestik atau dikenal dengan istilah *Domestic Resource Cost (DRC)* adalah analisis yang bertujuan melihat apakah komoditi pertanian dikembangkan melalui proyek tertentu mempunyai keunggulan komparatif bila komoditi tersebut diimpor dari luar negeri (Soekartawi, 1996)

Biaya sumberdaya domestik dinilai dengan perbandingan konsep keunggulan sosial bersih yaitu penerimaan dan pendapatan serta kerugian bersih dari suatu aktivitas ekonomi dinilai berdasarkan harga bayangan sehingga efek distorsi pasar dan eksternalitas lainnya dapat diminimumkan pengaruhnya, dalam analisis BSD diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Output harus bersifat *tradeable*.
2. Biaya produksi dari tambahan satu-satuan output ditentukan oleh hubungan input-output yang konstan dan harga relatif dari faktor-faktor produksi adalah konstan.
3. Harga bayangan input dan output dapat dihitung dan mewakili biaya imbalan sosial sesungguhnya.

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan biaya ke dalam komponen biaya asing dan domestik untuk impor *nontradeable* sebagian besar dipenuhi dari pasar domestik ditetapkan sebagai komponen biaya domestik yaitu berupa tanah, tenaga kerja, peralatan, bibit, dan pupuk kandang. Sedangkan input *tradeable* dan input asing yang dipergunakan dalam proses produksi barang *nontradeable* akan dialokasikan sebagai komponen biaya asing. Berdasarkan prinsip pendekatan langsung maka seluruh input *nontradeable* tersebut dialokasikan 100% sebagai komponen harga domestik untuk input *tradeable*.

Berdasarkan uraian di atas, maka persamaan untuk menentukan besaran Biaya Sumberdaya Domestik adalah:

$$BSD = \frac{B}{(P - BA)} US\$$$

Dimana:

BD = Biaya Domestik

P = Penerimaan

BA = Biaya Asing

Jika :

$BSD \leq$ harga bayangan nilai tukar maka dikatakan menguntungkan; dan

$BSD \geq$ harga bayangan nilai tukar maka tidak menguntungkan.

Adapun penentuan nilai tukar dapat diketahui dengan persamaan berikut:

$$rt = \frac{100 + Y_t}{100 + Z_t} X_t$$

Dimana:

rt = nilai tukar

Y_t = laju inflasi dalam negeri

Z_t = laju inflasi luar negeri

X_t = nilai tukar resmi tahun dasar

2.6 Location Quotient

Menurut Warpani (1984:55-68), Metode LQ adalah suatu teknik analisis yang merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (*basic sector*) dan sektor mana yang bukan sektor basis (*non-basic sector*). Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut. Secara matematis, LQ dapat dirumuskan:

$$LQ = \frac{S_i / N_i}{S / N}$$

Dengan:

S_i : Jumlah produksi komoditas i di tingkat kecamatan/kota

S : Jumlah produksi seluruh komoditas di tingkat kecamatan/kota

N_i : Jumlah produksi komoditas i di tingkat kabupaten

N : Jumlah produksi seluruh komoditas di kabupaten

Jika:

$LQ > 1$: Merupakan sektor basis serta memiliki kecenderungan ekspor

$LQ = 1$: Bukan merupakan sektor basis serta memiliki kecenderungan impas

$LQ < 1$: Merupakan sektor non-basis serta memiliki kecenderungan impor

Analisis LQ merupakan suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah, cepat dan tepat. Karena kesederhaannya, teknik LQ dapat dihitung berulang kali dengan menggunakan berbagai peubah acuan dan periode waktu. Perhitungan LQ dapat dilakukan pula untuk membandingkan indikator di tingkat provinsi dengan tingkat nasional (Adisasmita, 2008: 29).

2.7 Linkage System

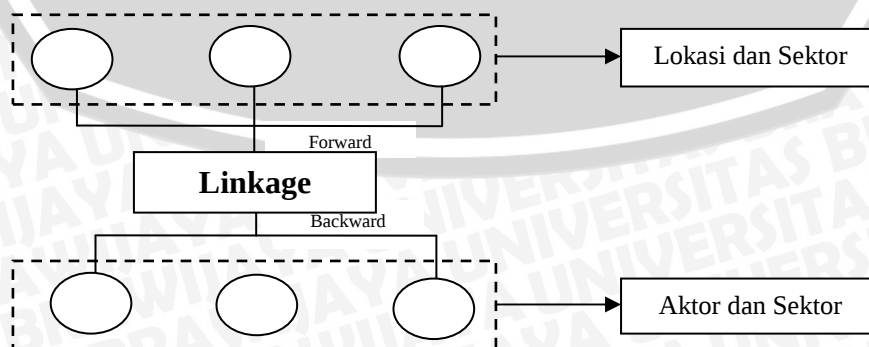
Analisis keterkaitan atau sistem hubungan (*linkage system*) digunakan untuk mengetahui hubungan lokasi dua atau lebih aktivitas yang dapat berbentuk aktivitas secara timbal balik atau juga berbentuk penolakan aktivitas secara timbal balik (Hoover, 1971 dalam Kuncoro, 1992:150). Keterkaitan ini dibagi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*)

Keterkaitan ke belakang adalah keterkaitan produksi barang dengan penyedia input produksi (keterkaitan wilayah penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan penyediaan bahan baku dan sarana produksi).

2. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*)

Keterkaitan ke depan yaitu keterkaitan produksi barang dengan penggunaan *output* produksi (keterkaitan wilayah pemasaran dan keterkaitan dengan industri pengguna *output* produksi).



Gambar 2.2 Konsep Linkage Sistem

Sumber: Tunjung, 2009:188

2.8 Aksesibilitas

Menurut Black (1981) dalam Tamin (2000:32) aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan ‘mudah’ atau ‘susah’nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.

2.8.1 Aksesibilitas Dalam Bentuk Hubungan Transportasi

Menurut Black (1981) dalam Tamin (2000:33), secara sederhana aksesibilitas dapat dinilai berdasarkan bentuk hubungan transportasi menggunakan dua faktor sebagai penentu tingkat aksesibilitas suatu lokasi. Faktor yang pertama adalah faktor jarak antara lokasi tersebut dengan lokasi lainnya. Faktor kedua adalah kondisi prasarana yang menghubungkan kedua lokasi. Kondisi prasarana transportasi yang dimasukkan ke dalam analisis ini adalah kondisi prasarana transportasi berupa perkerasan jalan. Penentuan tingkat aksesibilitas yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas

Kondisi Prasarana		Sangat Buruk	Sangat Baik
Jarak	Jauh	Aksesibilitas rendah	Aksesibilitas Menengah
	Dekat	Aksesibilitas menengah	Aksesibilitas tinggi

Sumber: Tamin, 2000:33

2.9 Kelembagaan Pertanian

Aspek kelembagaan pertanian dapat berupa kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah, tergantung dari segi kepentingannya. Aspek kelembagaan sangat penting bukan saja dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan, tetapi juga dari segi ekonomi pedesaan. Bahkan mosher (1974) mengidentifikasikan bahwa aspek kelembagaan merupakan syarat pokok yang diperlukan agar struktur pembangunan pedesaan dapat dikatakan maju (Sitio dan Tamba, 2001).

Adanya pasar memang mendorong kehidupan ekonomi di daerah sekitarnya. Manakala pasar terletak jauh dengan sentra produksi, maka pemerintah berusaha mendekatkannya, misalnya dengan cara membentuk koperasi unit desa (KUD), yaitu suatu lembaga perekonomian yang tugasnya menyalurkan faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan pertanian dan sekaligus juga ditugaskan untuk membeli hasil

pertanian yang diproduksi petani. Lebih luas lagi, dalam konsep ini kelembagaan yang melayani petani, yaitu:

- b. Adanya penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan ini dilengkapi dengan petugasnya yang lebih dikenal dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
- c. Adanya lembaga penyaluran sarana produksi. Seperti diketahui bahwa penyaluran faktor produksi seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan yang dilakukan oleh penyalur hanya sampai di lini IV, yaitu KUD. Ini berarti bahwa KUD bertugas untuk menyalurkan ke kelompok tani atau ke petani.
- d. Adanya lembaga yang mampu membeli hasil pertanian yang diproduksi petani, yaitu dalam hal ini adalah KUD yang ditugaskan.

2.9.1 Pengertian dan Fungsi Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang dibentuk untuk satu wilayah potensi ekonomi/desa yang merupakan satu kesatuan ekonomi dalam satu kecamatan. Untuk satu wilayah potensi ekonomi/desa dianjurkan membentuk satu koperasi unit desa, yang menjadi anggota KUD yaitu orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD (Edilius dan Sudarsono, 1993:18).

Adapun fungsi koperasi unit desa ini antara lain:

1. Perkreditan;
2. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian;
3. Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian;
4. Pelayanan jasa lainnya; dan
5. Melakukan kegiatan ekonomi lainnya.

2.10 Tinjauan Teori Lokasi

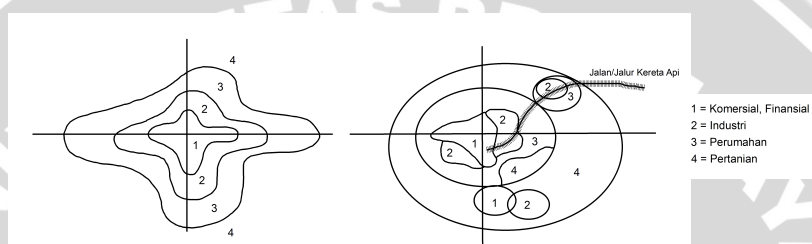
2.10.1 Teori Lokasi Konsentrasi dan Aksial-Radikal

Teori Lokasi Burgess (1925)

Model Burgess adalah sebuah model skematis yang dikembangkan dalam mengelompokkan aktivitas-aktivitas atas dasar konsentrasi dalam jarak yang berturut-turut dalam kawasan dari pusat ke arah *hinterland*. Hipotesis Burgess menyatakan bahwa zona-zona penggunaan lahan akan menjaga keteraturan, tetapi karena kota tumbuh dan berkembang maka setiap zona harus menyebar dan bergerak keluar, menggeser zona berikutnya dan menciptakan zona transisi penggunaan tanah (Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju, 2011:71).

Teori Lokasi Aksial-Radikal oleh Harvey (1996)

Teori lokasi aksial-radikal dikembangkan oleh Harvey (1996) adalah sebuah peningkatan dalam memodifikasi zona konsentrasi untuk mengikuti pola topografi. Hal ini berarti biaya transportasi per unit lebih rendah dalam beberapa arah dari yang lainnya. Konstruksi jalan akan menyebabkan zona-zona yang berbentuk “bintang laut”. Jadi meskipun A dan B berbeda jarak dari pusat, mereka akan menggambarkan penggunaan tanah yang sama berdasarkan waktu tempuh yang sama dari pusat. Pengembangan model aksial-radikal berdasarkan aksesibilitas dapat diilustrasikan sebagai berikut (Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju, 2011:71).



Gambar 2.3 Teori Lokasi Aksial-Radikal
Sumber: Rustiadi, 2011:72

2.10.2 Teori Lokasi Von Thunen dan Weber

Dari sekian banyak teori lokasi dan teori perwilayahan yang telah diintroduksi oleh para pencetusnya dapat diketengahkan beberapa diantaranya yang dianggap penting, yaitu Von Thunen (1826) dan A. Weber (1909).

Von Thunen telah mengembangkan hubungan antara perbedaan lokasi pada tata ruang (*spatial location*) dan pola penggunaan tanah. Menurut Von Thunen jenis penggunaan tanah dipengaruhi oleh tingkat sewa tanah dan didasarkan pula pada aksesibilitas relatif. Lokasi berbagai jenis produksi pertanian (seperti menghasilkan susu, kehutanan, dan sebagainya) ditentukan oleh kaitan antara harga barang-barang hasil dalam pasar dan jarak antara daerah produksi dengan pasar penjualan. Kegiatan yang mampu menghasilkan panen fisik tertinggi per hektar ditempatkan pada kawasan konsentris yang pertama di sekitar kota, karena keuntungan yang tinggi per hektar memungkinkan untuk membayar sewa tanah yang tinggi. Kawasan produksi berikutnya adalah kurang intensif dibandingkan dengan kawasan produksi yang pertama, demikian seterusnya.

Analisa penentuan lokasi optimum seperti dikemukakan oleh Von Thunen telah mendapat perhatian utama dalam pemikiran Alfred Weber. Weber menekankan

pentingnya biaya transportasi sebagai faktor pertimbangan lokasi. Teori Weber sebenarnya menekankan dua kekuatan lokasional primer, yaitu selain orientasi transportasi juga orientasi tenaga kerja. Ia telah mengembangkan pula dasar-dasar analisis wilayah pasar dan merupakan seorang ahli teori lokasi yang pertama membahas mengenai aglomerasi industri secara eksplisit.

Prinsip teori Weber adalah bahwa penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal (*least cost location*) yaitu tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum.

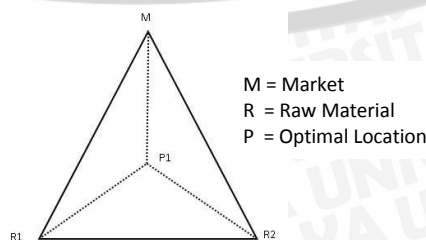
Prinsip ini didasarkan pada enam asumsi bersifat prakondisi, yaitu:

1. Wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim, dan penduduknya
2. Ketersediaan sumberdaya alam
3. Upah tenaga kerja
4. Biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik
5. Persaingan antar kegiatan industri
6. Manusia berpikir secara rasional

Weber juga menyusun sebuah model yang dikenal dengan istilah segitiga lokasional (*locational triangle*), yang didasarkan pada asumsi:

1. Bahwa daerah yang menjadi obyek penelitian adalah daerah yang terisolasi. Konsumennya terpusat pada pusat-pusat tertentu.
2. Beberapa sumberdaya alam tersedia secara memadai.
3. Barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral adalah sporadik tersedia secara terbatas.
4. Tenaga kerja tidak menyebar secara merata tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dengan mobilitas yang terbatas.

Pemikiran Weber telah memberikan sumbangan ilmiah dalam banyak aspek, diantaranya yaitu penentuan lokasi yang optimal dan kontribusinya yang esensial dalam pengembangan wilayah yaitu mengenai munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi/industri (Adisasmita, 2010: 14-15).



Gambar 2.4 Segitiga Lokasional A. Weber

2.11 Metodologi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi

Untuk mengimplementasikan konsepsi Pengembangan Sentra Produksi, perlu dilakukan beberapa program yang dibedakan menurut: (i) program yang diarahkan untuk menyusun/mewujudkan Peta Pengembangan Sentra Produksi setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan (ii) program untuk *mengisi* Peta Pengembangan Sentra Produksi yang dihasilkan.

A. Penyusunan Peta Pengembangan Sentra Produksi

Peta Pengembangan Sentra Produksi disusun menurut beberapa jenjang yaitu: tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Pada tingkat provinsi, Peta Pengembangan Sentra Produksi hanya berfungsi sebagai arahan lokasi, sedangkan Peta Pengembangan Sentra Produksi pada tingkat desa merupakan peta kerja. Jika Peta Pengembangan Sentra Produksi pada tingkat desa belum tersedia, fungsinya digantikan oleh Peta Pengembangan Sentra Produksi tingkat kecamatan (Soemarno, 1996:381).

B. Program Peta Pengembangan Sentra Produksi

Kelompok program berikut diarahkan untuk mengisi Peta Pengembangan Sentra Produksi, dan dibedakan menjadi empat jenis program (Soemarno, 1996:382-383), yaitu:

1. Program Penunjang Proses/Kegiatan Produksi
Program ini meliputi semua proyek yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, mulai dari pengadaan bibit sampai kegiatan pascapanen.
2. Program Penunjang Kegiatan Pemasaran
Meliputi semua kegiatan yang mendukung kegiatan pemasaran hasil-hasil produksi komoditas tanaman.
3. Program Peningkatan Daya Saing Komoditas
Meliputi program-program untuk meningkatkan kinerja pemasaran dan produktivitas komoditas tanaman berupa penerapan teknologi, peningkatan kemampuan kelembagaan yang ada (keuangan, koperasi, dan sebagainya), peningkatan kualitas sumberdaya manusia (pendidikan dan penyuluhan, dan sebagainya).
4. Program Peningkatan Struktur Tata Ruang
Meliputi program-program pengembangan struktur tata ruang yang menunjang secara langsung atau tidak langsung ketiga jenis program yang

disebutkan pertama. Proyek-proyek yang termasuk dalam program ini antara lain berupa peningkatan jalan desa, pengembangan pusat-pusat pelatihan dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di kota-kota, dan sebagainya.

C. Pemetaan Sentra Produksi Komoditas

Hasil analisis yang dilakukan dirangkum dan ditayangkan pada suatu peta yang disebut Peta Pengembangan Sentra Produksi yang memuat kawasan-kawasan pengembangan yang diprioritaskan bagi komoditas tanaman tertentu.

2.12 Metode Content Analysis/Analisis Isi

1. Pengertian Dasar dan Kegunaan Analisis Isi

Analisis Isi (*Content Analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah “teks”, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait pada isi komunikasi dalam sebuah teks (Ekomadyo, 2006:52).

2. Prosedur Analisis Isi

Metode Analisis Isi menuntut beberapa persyaratan: objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan. Neuman (2000) menyebutkan langkah-langkah dalam meneliti dengan metode Analisis Isi, yaitu (1) menentukan unit analisis (misalnya jumlah teks yang ditetapkan sebagai kode), (2) menentukan sampling, (3) menentukan variabel dan menyusun kategori pengkodean, dan (5) menarik kesimpulan (Ekomadyo, 2006:52).

2.13 Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS)

The Method of Root Cause Analysis and Solution (MRCAS) atau dikenal dengan Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS) adalah suatu metode berpikir dengan menggunakan tata alir (*flow chart*) yang terutama dimaksudkan untuk mendapatkan “sebab terdalam atau akar suatu masalah”, dan kemudian berdasarkan itu, dapat membuat alternatif solusi dasar (Harsono, 2008:73). Metode ini dilengkapi dengan beberapa konsep dan syarat yang perlu digunakan dalam menerapkannya. Konsep yang terpenting adalah pendekatan terhadap masalah (realitas); sumber-sumber kebenaran (ilmu), dan teori-teori kebenaran (*theory of truth*).

Metode dengan peragaan tata alir dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan pemodelan konkrit dalam mengidentifikasi permasalahan dibandingkan dengan identifikasi permasalahan dalam wujud verbal. Berikut ini adalah langkah-langkah menjalankan peragaan tata alir dalam MAAMS (Harsono, 2008:74-75:

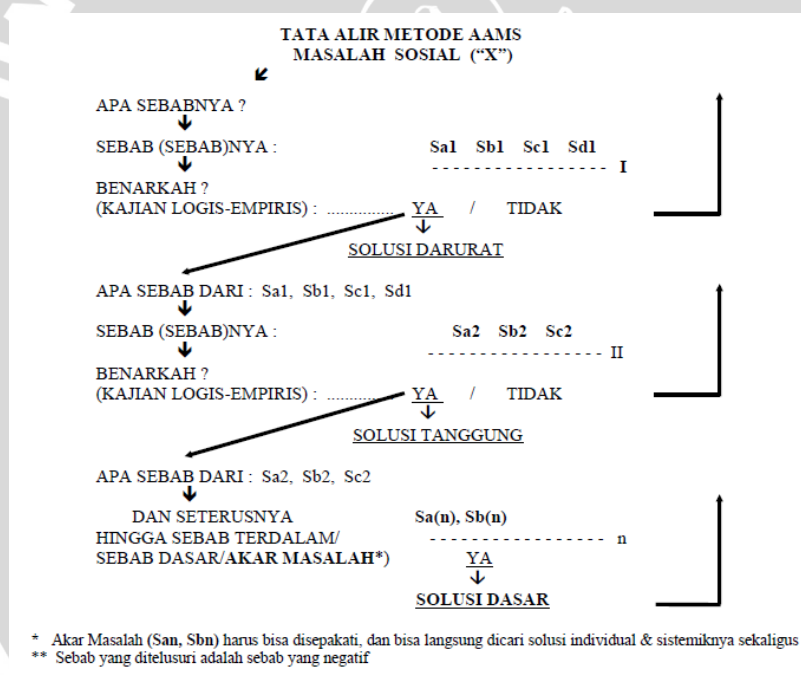
- a. Rumuskan suatu masalah yang dapat diajukan pertanyaan “apa sebab sebabnya?”. Identifikasi lebih dulu alasan-alasan atau fakta-fakta yang biasanya ditulis sebagai latar belakang masalah. Terhadap alasan-alasan inilah diajukan pertanyaan mengapa atau apa sebabnya.
- b. Identifikasi sebab-sebab negatif yang paling langsung dari permasalahan yang ada (Masalah X).
- c. Terhadap masing-masing sebab (faktor) diajukan pertanyaan “benarkah?” dalam arti apakah ia memang menjadi sebab dari masalah X. Untuk itu lebih dulu dilakukan pengkajian atau penelitian, baik secara logis (formal/deskriptif) ataupun empiris (material), kualitatif maupun kuantitatif, induktif maupun deduktif (Hayon, 2005). Jika hasilnya benar, tahap kedua dari penelusuran sebab dapat dilakukan, yang berarti mencari sebab-sebab dari setiap sebab pada tahap pertama. Jika hasilnya salah, sebab tersebut diabaikan dan kembali ke awal dengan mengidentifikasi kemungkinan sebab lainnya.
- d. Tahap kedua dan seterusnya (tahap ke n) caranya sama seperti tahap pertama. Bedanya adalah bahwa kemungkinan sebab (faktor) yang diidentifikasi menjadi semakin sedikit karena adanya kesamaan.

Catatan:

- *Pertama*, sangat mungkin bahwa penyebab Sa1 (atau Sb1) lebih dari satu sehingga bukan hanya Sa2 tapi Sa2.1 dan Sa2.2; identifikasi ini penting dilakukan sebelum menetapkan salah satu atau semuanya untuk ditelusuri. Dalam hal ini untuk penelusuran tahap ketiga (Sa3 bisa saja dipilih satu yang paling relevan atau yang menunjukkan kesamaan dengan Sb3, Sc3, atau Sd3).
- *Kedua*, sebab-sebab yang sudah ditulis dengan sendirinya tidak dapat ditulis lagi pada tahap berikutnya; hal ini untuk menghindari alur pikir melingkar.
- *Ketiga*, rumusan kalimat secara keseluruhan harus bermakna hal negatif, bukan positif, kecuali pada jenis masalah yang sifatnya “hanya demi peningkatan untuk lebih baik lagi, bukan pemulihan”

- *Keempat*, rumusan kalimat untuk setiap sebab tidak menggunakan kata-kata seperti karena, sehingga, maka, akibatnya, dsb.
 - *Kelima*, sebab yang ditulis pada urutan berikutnya bukan sekedar penjabaran atau ungkapan lain dari sebab sebelumnya. Penjabaran atau rincian yang panjang dapat disampaikan dalam bentuk catatan kaki.
- d. Penelusuran dapat dihentikan dengan memperhatikan dua syarat. Pertama, apa yang dipandang sebagai akar masalah tersebut dapat secara sekaligus dicarikan solusi individual/personal/mentalistik maupun solusi sistemik /struktural /institusional/legalistik.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa MAAMS merupakan metode yang memiliki sifat kualitatif, deduktif, maupun induktif, yang dalam penerapan rincinya (tahap pembuktian/penelitian) sangat mungkin membutuhkan analisis kuantitatif serta penerapan logika formal dan material. Berikut adalah contoh penerapan MAAMS:



Gambar 2.5 Tata Alir Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi

Sumber: Harsono, 2008:75

Tabel 2.5 Contoh Penerapan MAAMS

Sebab a1	Sebab b1	Sebab c1	Sebab d1
Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan
Sebab a2	Sebab b2	Sebab c2	Sebab d2
Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan
Sebab a3	Sebab b3	Sebab c3	Sebab d3
Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan
Penjelasan			
1. catatan kaki 1			
2. catatan kaki 2			

Sumber: Harsono, 2008:77

2.14 TINJAUAN PENELITIAN SEJENIS

Tabel 2.6 Penelitian Sejenis

No.	Judul Penelitian / Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Puteh (2004); “Kebijakan Pengembangan Sentra Produksi Nilam di Prov. Nangroe Aceh Darussalam”	- Kesesuaian Lahan - Ketersediaan bibit - Produksi - Kelembagaan dan permodalan - Pemasaran - Pengolahan	- Analisis akar permasalahan	- Arahan kebijakan untuk pengembangan sentra produksi nilam antara lain: (1) berupaya menarik investor, (2) menentukan kawasan sentra produksi yang sesuai dengan kebutuhan lahan perkebunan nilam, (3) mengembangkan koperasi agribisnis nilam, (4) mengadopsi teknologi pembudidayaan nilam, (5) penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani nilam	Dalam studi pengembangan kawasan sentra produksi jagung di Kec. Limboto menggunakan teori-teori mengenai KSP sebagai alat analisis dalam mengidentifikasi karakteristik obyek studi. Hal ini berbeda dengan penelitian Puteh (2004) yang menjadikan analisis akar masalah sebagai satu-satunya bahan untuk merumuskan kebijakan.
2	Saptana (2005); “Pengembangan Hortikultura di Kawasan Agribisnis Holtikultura Sumatera (KHS)”	- Aspek produksi - Aspek tarikan pasar - Aspek konsumsi	- Identifikasi spesialisasi setiap kabupaten dianalisis dengan pendekatan indeks spesialisasi produksi - Indikator tarikan pasar dianalisis dengan aliran komoditas dari sentra ke konsumen - Indikator konsumsi didasarkan pada tingkat konsumsi perkapita di seluruh Sumatera.	- Pengembangan sentra sayuran di KHS akan lebih baik kalau difokuskan pada wilayah sentra-sentra produksi dataran tinggi dalam kawasan yang kompak. - Peningkatan produktivitas pertanian sayuran di KHS perlu dilakukan dengan (1) mempertahankan kawasan sentra yang berpotensi produktivitas tinggi seperti Karo, Simalungan, Deli, Serdang, Tapanuli, dan Solok.; (2) mempercepat pertumbuhan di sentra utama seperti Simalungan; (3) pertumbuhan selanjutnya perlu diperhatikan di Kab. Tanah Datar, Agam, Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Utara	Dalam studi pengembangan kawasan sentra produksi jagung di Kec. Limboto menggunakan variabel –variabel dari literatur mengenai konsep pengembangan termasuk didalamnya asaz pengembangan KSP, Kajian kesesuaian KSP, dan identifikasi faktor penunjang KSP.
3.	Dimas Yoga (2006); “Pengembangan Kawasan Sentra Kecil Gula Kelapa Kabupaten Banyumas”	- Karakteristik fisik - Karakteristik kegiatan - Karakteristik produk - Potensi ekonomi	- Analisis potensi ekonomi dengan LQ - Analisis profitabilitas - Analisis linkage system	- Pengembangan kawasan sentra kecil gula kelapa di Kabupaten Banyumas, yang meliputi; (1) Arahan pengembangan kawasan sentra dan	Dalam studi pengembangan kawasan sentra produksi jagung di Kec. Limboto menggunakan variabel –variabel dari literatur

No.	Judul Penelitian / Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Keterangan
		- Kontribusi terhadap PDRB - Profitabilitas - Input produksi - Output produksi - Simpul distribusi - Penentuan kapasitas produksi - Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman - Tata letak ruang layout sentra	- Analisis penentuan kapasitas produksi - Analisis penentuan kawasan - Analisis penentuan lokasi sentra - Analisis tata letak ruang layout sentra	(2) Program pengembangan kecil gula kelapa di Kabupaten Banyumas	mengenai konsep pengembangan termasuk didalamnya azas pengembangan KSP, Kajian kesesuaian KSP, dan identifikasi faktor penunjang KSP.

Sumber: Hasil Telaah Pustaka, 2010